



Vol 4 No 1, Juni 2024

**Siti Rohaeni**

sitirohaeni4852@gmail.com

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi  
(STIE) Ekuitas Baandung,  
Indonesia*

**Kata Kunci:** Transparansi,  
akuntabilitas pengelolaan dana  
desa, kinerja pemerintah desa.

**Keywords:** *Transparency,  
accountability in village fund  
management, village  
government performance.*

## **PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA (STUDI PADA PEMERINTAH DESA KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG)**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kinerja pemerintah desa (studi pada pemerintah desa Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Metode ini menggunakan data primer dalam bentuk penyebaran kuesioner. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 desa di kecamatan dawuan dan responden dalam penelitian ini berjumlah 47 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Secara simultan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.

### **ABSTRACT**

*This study, which examines the village government of Dawuan District, Subang Regency, attempts to ascertain the impact of accountability and transparency in village fund management on the functioning of village governments. This study employed a quantitative methodology that included a descriptive and verification approach. This approach makes use of primary data by sending out surveys. Ten villages in the Dawuan subdistrict made up the study's sample, and 47 persons participated as respondents. Purposive sampling is used in the sampling procedure. Analysis using multiple linear regression is the analytical technique employed. The study's findings*

*demonstrate that village government performance is positively and significantly impacted by partial accountability and openness in village budget management. The functioning of the village government is positively and significantly impacted by the openness and accountability of the village fund management process.*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kinerja organisasi sektor publik adalah gambaran tentang pencapaian sasaran dan tujuan organisasi sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi organisasi. Kinerja juga menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan, 2014). Hampir setiap pemerintahan selalu menuntut kinerja yang baik seiring dengan otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintah. Sehubungan dengan tujuan dan visi organisasi, pemangku kepentingan dan masyarakat harus diberitahu tentang kinerja pemerintah (Sufiati et al., 2022).

Kinerja aparatur desa di nilai masih kurang baik, dapat dilihat dari bagaimana dana desa dialokasikan untuk pembangunan dan infrastruktur yang telah digunakan masih ada beberapa desa yang belum memiliki cukup pembangunan dan infrastruktur. Yadi menyatakan bahwa pembangunan desa di beberapa wilayah Kabupaten Subang masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Dia juga menyatakan bahwa beberapa jalan di Kecamatan Dawuan masih tidak layak untuk kendaraan, terutama kendaraan bermuatan besar (<https://benpas.subang.go.id/>). Beberapa daerah di Kabupaten Subang belum melakukan kegiatan pembangunan desa karena dana desa belum dicairkan. Contohnya adalah Kecamatan Cijambe, di mana Kepala Desa H. Didin Saepudin menyatakan bahwa sampai bulan Juli 2023 pencairan dana desa masih belum terjadi, Sehingga belum ada kegiatan pembangunan desa yang dilakukan karena dana untuk pembangunan tersebut belum ada (<https://www.mediajabar.com/>). Meskipun, pada Juli 2019 Pemkab Subang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) tentang Bimbingan, Pelatihan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan yang Bersih (<https://infopublik.id/>). Bupati juga secara langsung memerintahkan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk menunjukkan transparansi anggaran dalam upaya memerangi

---

korupsi di pemerintahan daerah Kabupaten Subang. Namun pada praktiknya masih terjadi korupsi di pemerintah daerah Kabupaten Subang. Seperti yang terjadi pada bulan September 2023 dimana Kabupaten Subang telah menetapkan dua anggota DPRD Subang terkait kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (Pokir) senilai Rp100 juta di tahun 2020 dan Rp150 juta di tahun 2021. Dimana uang tersebut seharusnya ditransfer ke rekeningdesa yang diperuntukkan dan ditujukan untuk penguatan penambahan penyerahan modal BUMDes (<https://subang.inews.id/>).

Pemerintah kabupaten subang memiliki beberapa masalah dengan anggaran tahunan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, anggaran yang telah digunakan pemerintah daerah kabupaten subang tidak transparan tentang seberapa efektif mereka membantu pembangunan desa.

Suatu organisasi harus mematuhi aturan transparansi, dan jika masyarakat atau pihak yang berkepentingan membutuhkan informasi, informasi itu harus jelas. Meskipun akuntabilitas adalah komponen yang berbeda, akuntabilitas dapat digabungkan dengan transparansi. Jika tidak, akuntabilitas keuangan daerah dapat dimanipulasi, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang diperlukan (<https://pasundan.jabarekspres.com/>). Hasil Penelitian yang dilakukan Sufiati et al., (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berdampak positif dan signifikan pada kinerja lembaga pemerintah daerah kota makassar.

## **2. Identifikasi Masalah/Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana transparansi dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang
- b. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang
- c. Bagaimana kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang
- d. Apakah transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang

- e. Apakah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang
- f. Apakah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa pada pemerintah desa Kecamatan Dawuan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui transparansi dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang.
- b. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang
- c. Untuk mengetahui kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang
- d. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap kinerja pemerintah pada pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang
- e. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap kinerja pemerintah pada pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang
- f. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kinerja pemerintah desa pada pemerintah desa Kecamatan Dawuan

## **TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **TRANSPARANSI**

Transparansi merupakan suatu tindakan keterbukaan mengenai informasi maupun proses pelaksanaan atas suatu kegiatan kepada publik, dan ketika publik membutuhkan informasi tersebut, publik dapat dengan mudah mendapatkannya. Dengan adanya keterbukaan, maka dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pihak yang berwenang, sehingga dana desa yang penggunaannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat terserap dengan baik (Fajri et al., 2021).

---

Menurut Mahmudi (2019), transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2018).

#### **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**

Akuntabilitas menunjukkan bahwa seseorang atau unit organisasi harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas juga menitikberatkan pada peran pengawas dan mengharapakan jabatan dan pegawai menetapkan proses perencanaan dan penganggaran yang memungkinkan mereka memberikan layanan yang optimal (sambo et al., 2022).

Menurut Sujarweni (2015), akuntabilitas adalah kewajiban seorang (pimpinan, pejabat, atau pelaksana) untuk memastikan bahwa tanggung jawab dan tanggung jawab yang diembannya telah dilaksanakan dengan benar. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang kepentingan dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, dan mengungkapkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban mendapatkan pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27).

#### **KINERJA PEMERINTAH DESA**

Kinerja adalah gambaran atau kemampuan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Mahsun, 2018:25). Menurut Sutrisno (2016:34), kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing- masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala

desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman teknis kontrak kinerja, pelaporan, tata cara penelaahan kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan dasar pelaksanaan efisiensi tata kelola untuk menjamin peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan memperjelas hal yang harus dicapai dalam suatu organisasi dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi pemerintah.

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2017:8), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Menurut Ghozali (2021:93) data dapat diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama oleh peneliti. Data primer berasal dari individu yang memberikan informasi lewat wawancara, menjawab kuesioner, dan wawancara mendalam. Menurut Sugiyono (2018:147) analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambar data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Sugiyono (2018:54) analisis verifikatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menguji teori dan penelitian akan menghasilkan informasi ilmiah baru yaitu status hipotesis yang berupa kesimpulan apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak. Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda sebelum melakukan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali (2018:107), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2018:137) bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi

---

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2018:95) analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) terhadap suatu variabel terikat (dependen). Menurut Sugiyono (2017:183), teknik korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Menurut Ghozali (2018:97), koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Menurut Ghozali (2018:179) uji pengaruh bersama-sama (joint) atau uji statistik f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau joint mempengaruhi variabel dependen. Menurut Ghozali (2018:179) uji parsial (t test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

- Uji Normalitas  
Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S). Terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,061. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.
- Uji Multikolinieritas  
Nilai VIF (Variance Inflation Factor) adalah 2,286 dan nilai toleransi sebesar 0,437. Hasil ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas.
- Uji Heteroskedastisitas  
nilai VIF (Variance Inflation Factor) adalah 2,286 dan nilai toleransi sebesar 0,437. Hasil ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas.
- Analisis Regresi Linier Berganda

nilai Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 25 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 7,929 menyatakan bahwa jika Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka Kinerja Pemerintah Desa akan bernilai sebesar 7,929.
  - Nilai variabel X1 yaitu transparansi memiliki koefisien sebesar 0,327, artinya jika transparansi meningkat sebesar 1% dan variabel lainnya konstan maka kinerja pemerintah desa akan meningkat sebesar 0,327.
  - Nilai variabel X2 yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki koefisien sebesar 0,215, artinya jika transparansi meningkat sebesar 1% dan variabel lainnya konstan maka kinerja pemerintah desa akan meningkat sebesar 0,215.
- Koefisien Korelasi  
Interpretasi koefisien korelasi untuk variabel Transparansi (X1) dan Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X2) menunjukkan adanya hubungan yang kuat dengan Kinerja Pemerintah Desa (Y) secara Parsial karena berada pada rentang 0,60 – 0,799.
  - Koefisien Determinasi  
Nilai R Square sebesar 0,515 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 Secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 51,50% dan sisanya sebesar 48,50% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
  - Uji T  
Hasil untuk pengujian hipotesis parsial yaitu sebagai berikut:
    - Nilai Sig. Untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar  $0,031 < 0,05$  dan nilai thitung  $2,231 > t_{tabel} 2,014$  yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
    - Nilai Sig. Untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar  $0,013 < 0,05$  dan nilai thitung  $2,600 > t_{tabel} 2,014$  berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
-

- Uji F

Nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap Y adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $f_{hitung} 23,365 > f_{tabel} 3,20$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

#### PEMBAHASAN

- Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 10 desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai transparansi yang meliputi 8 butir pernyataan dan jumlah responden 47 orang diperoleh total skor aktual 1.661 dan skor idealnya 1.880 dengan persentase sebesar 88,35%. Maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa indikator transparansi telah berjalan dan dilaksanakan oleh perangkat desa dengan baik. Data ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada sebagian besar desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Dawuan sudah sangat transparan. Pada indikator informatif, sebagian besar responden sependapat bahwa ketersediaan informasi dan kemudahan dalam memperoleh informasi sudah dilaksanakan dengan baik. Pada indikator keterbukaan dan pengungkapan sebagian responden berpendapat bahwa desa memberikan kebebasan pada setiap masyarakat agar bisa memperoleh informasi secara terbuka. Hasil penelitian secara parsial yang disajikan pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,031 < 0,05$ . Hal tersebut sesuai dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Transparansi (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa pada Pemerintah Desa

Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) yang menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Jika perangkat desa menjadi lebih transparan, maka akan menunjukkan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Perangkat Desa juga akan menerima tekanan dari pengawasan publik dan penilaian publik untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik, yang berarti lebih banyak transparansi dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa.

- Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 10 desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang meliputi 16 butir pernyataan dan jumlah responden 47 orang diperoleh total skor aktual 3.324 dan skor idealnya 3.760 dengan persentase sebesar 88,40%. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang sangat baik. Hasil penelitian secara parsial yang disajikan pada tabel 4.23 menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,013 < 0,05$ . Hal tersebut sesuai dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang. Hal ini didukung oleh penelitian Marin Sambo et.al (2022) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar. Akuntabilitas berarti bahwa penyelenggara kegiatan publik harus menjelaskan dan menjawab segala hal yang berkaitan dengan seluruh proses dan keputusan yang dibuat, serta bertanggung jawab atas hasil dan kinerja mereka. Karena semakin banyak instansi yang bertanggung jawab atas kinerja pemerintah, keterbukaan urusan publik akan memudahkan pengawasan pemerintahan. Pengawasan publik dapat membantu mencegah penyelewengan sumber daya dan pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi dan pelanggaran lainnya. Dengan kata lain, semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik pula kinerja instansi pemerintah.

- Transparansi Dan Akuntabilitas Penelolan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

---

Hasil penelitian secara Simultan yang disajikan pada tabel 4.24 menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal tersebut sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Transparansi (X1) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang. Hal ini didukung oleh penelitian Ulya et.al (2018) yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Menurut ulya et.al (2018) menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan jika transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil penelitian Transparansi pada Pemerintah Desa Kecamatan Dawuan termasuk dalam kategori baik. Pengelolaan dana desa di kecamatan dawuan sudah dilaksanakan dengan transparan dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat juga sudah mudah diakses oleh pengguna. Informasi yang diperoleh juga sudah jelas dan akurat. Selain itu, masyarakat juga diberikan kebebasan dalam mengakses informasi yang diperlukan.
- Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Dawuan termasuk dalam kategori baik. Pengelolaan dana desa di Kecamatan Dawuan sudah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dan pelaksanaan belanja desa telah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, dan efisien. Evaluasi kinerja keuangan juga memperhatikan prinsip ekonomi, efektif, dan efisien dari setiap program. Kemudian pencatatan belanja, pendapatan, dan pembiayaan didasarkan pada kelengkapan bukti/dokumen pelaksanaan anggaran.
- Berdasarkan hasil penelitian Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan dawuan Kabupaten Subang dalam kategori baik, karena setiap perencanaan

kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan infrastruktur juga sudah memadai. Selain itu, terdapat perubahan lebih baik dari infrastruktur dan terdapat perubahan dalam tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah desa.

- Penerapan transparansi pengelolaan dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang.
- Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang.
- Penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qodariah, F. (2023, February 28). Rencana Persiapan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Subang Tahun 2023, Dari Jalan Hingga Drainase | BENPAS 98.2 FM. <https://benpas.subang.go.id/berita/rencana-persiapan-pembangunan-infrastruktur-di-kabupaten-subang-tahun-2023-dari-jalan-hingga-drainase>

Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.

Dede. (2021, March 26). *Anggaran Dipangkas, Apdesi Subang Desak Pemkab Cairkan ADD Pasundan Ekspres*. <https://pasundan.jabarekspres.com/2021/03/26/anggaran-dipangkas-apdesi-subang-desak-pemkab-cairkan-add/>

Dede. (2022, January 17). *Kondisi Jalan di Subang Banyak yang Rusak, Narca: Jangan Ganggu Anggaran Infrastruktur - Pasundan Ekspres*. <https://pasundan.jabarekspres.com/2022/01/17/kondisi-jalan-di-subang-banyak-yang-rusak-narca-jangan-ganggu-anggaran-infrastruktur/>

Dede. (2022, March 10). *DPMD Kabupaten Subang Tolak Berkas Pencairan Dana Desa Tak Lengkap - Pasundan Ekspres*. <https://pasundan.jabarekspres.com/2022/03/10/dpmd-kabupaten-subang-tolak-berkas-pencairan-dana-desa-tak-lengkap/>

---

- Driyantama Putra, D, Rantelangi, C, & Diyanti, F. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah pada dinas perdagangan Kota Samarinda. In *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman* (Vol. 7, Issue 1).
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-102. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
- Hamdah, S, & Kiri, P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik Serta Fungsi Pemeriksaan Inten Terhadap Kinerja Pemerintah Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Hamdi, A. S. Bahruddi, E. (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Heryawan, Y. (2023, September 21). Inilah Kronologi dan Peran Para Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Pokir DPRD Subang. <https://subang.inews.id/read/348260/inilah-kronologi-dan-peran-para-tersangka-dalam-kasus-dugaan-korupsi-dana-pokir-dprd-subang>
- Huba. (2023, February 2). Dana Desa Tahun 2023 Sudah Bisa Diserap - Pasundan Ekspres. <https://pasundan.jabarekspres.com/2023/02/02/dana-desa-tahun-2023-sudah-bisa-diserap/>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231-246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah / Mahmudi ; kata pengantar, Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A., Ak. (4th ed.). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik* (3rd ed.). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Mahsun, M. (2018). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPF. Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, Ed.). ANDI.
- marin sambo, E, Wiyana, A, Pattikaloba, S, & Tinggi Ilmu Ekonomi Makasar Bongaya, S. (2022). YUME : Journal of Management Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makasar. YUME : Journal of Management, 5(3), 293–305. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.446>
- Mumun, L. (2023, July 11). Dana Desa Belum Cair, Desa Cijambe Subang Ngaku Belum Ada Kegiatan - MEDIAJABAR.COM. <https://www.mediajabar.com/news/dana-desa-belum-cair-desa-cijambe-subang-ngaku-belum-ada-kegiatan>
- Novatiani, A, Wedi, R, Kusumah, R, & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. In Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis (Vol. 10). [www.eporja.bandungbaratkab.go.id](http://www.eporja.bandungbaratkab.go.id)
- Padilah, P, Rahayu, S, & Yudi, Y. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kabupaten Bungo). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 7(3), 180–191. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i3.25152>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Puspitasari, B. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kemampuan Kerja, Budaya Organisasi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Srimartani Kecamatan Piyungan).
- Riduwan dan Kuncoro, E. A. (2014). Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur). Alfabeta.
- Subang, M. K. (2019, June 30). InfoPublik - Penuhi Janji Transparansi Anggaran, Bupati Subang Tandatangani MoU Bersama GMPK. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/362947/penuhi-janji-transparansi-anggaran-bupati-subang-tandatangani-mou-bersama-gmpk?show=>
- Sugiyono. (2016). Metode Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta.
-

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). Sistem akuntansi / penulis, V. Wiratna Sujarweni ; editor, Mona (Mona, Ed.; Cetakan ke-1). Pustaka Baru Press.
- Suparman, Y. (2023, April 12). Harap Bersabar, Pemda Subang Belum Bisa Cairkan Alokasi Dana Desa. <https://pasundan.jabarekspres.com/2023/04/12/harap-bersabar-pemda-subang-belum-bisa-cairkan-alokasi-dana-desa/>
- Sutrisno, E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Prenadamedia Group Ulya dan Ernawati Budi Astuti, C., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Wahid Hasyim Semarang Jalan Menoreh Tengah, U. X. (2018). Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Tegal, BUMD Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat dan Lurah Kab Tegal). AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 13(2). [www.tegalkab.go.id](http://www.tegalkab.go.id)
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Zahra. A, Arif Lubis. F, & Harmain, H. (2023). SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. SEIKO : Journal of Management & Business,6(2), 236–247.